

“KAJIAN PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN STATUS KEPEMILIKAN DI KOTA PADANG PANJANG ”

¹⁾Rizkhy kurniawan sinaga, ²⁾Ezra Aditya,

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta

E-mail: [1\)rizkhykurniawansinaga21@gmail.com](mailto:1)rizkhykurniawansinaga21@gmail.com) [2\)adipwkubh@gmail.com](mailto:2)adipwkubh@gmail.com)

PENDAHULUAN

Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal penghuninya, sarana pembinaan keluarga serta cerminan harkat dan martabat bagi penghuni yang tinggal di dalamnya RTLH dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat 7 karakteristik. Pemerintah sebagai pembina, pengawas dan pengendali pembangunan perumahan selayaknya memahami fenomena ini sejak awal sehingga sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Aparat pemerintah yang berkaitan dengan perumahan masih banyak yang belum mengetahui akar masalah terjadinya perumahan tidak layak huni sehingga penyelesaiannya masih bersifat adhoc. Oleh sebab itu aparat pemerintah bidang perumahan harus diberi pengetahuan dan ketrampilan dalam menangani masalah perumahan tidak layak huni. Kota Padang Panjang terdiri dari 2 kecamatan dan 16 Kelurahan, berdasarkan data Dinas Perumahan Dan Permukiman Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Padang Panjang sebanyak 442 unit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prioritas penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan status kepemilikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dijabarkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data-data yang di peroleh dari instansi atau lembaga terkait di kota padang panjang. Adapun data berupa kebijakan, literatur terkait rumah tidak layak huni (RTLH). Data yang diambil adalah data yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik RTLH di Kota Padang Panjang. Data yang di gunakan yaitu data kondisi bangunan dan jumlah unit, kemudian data status

kepemilikan. setelah data didapatkan kemudian dilakukan analisis penentuan interval kelas digunakan untuk mengklasifikasikan kriteria rumah tidak layak huni. Analisis selanjutnya melakukan perhitungan pembobotan sederhana dengan cara menggunakan hierarki dari interval kelas yang digunakan seperti rendah, sedang dan tinggi. Setelah itu dilakukan analisis matriks dengan cara membandingkan dua hal yang berbeda atau lebih atau digunakan sebagai perbandingan dari beberapa faktor yang digunakan. Dalam hal ini digunakan faktor prioritas rumah tidak layak huni dan status kepemilikan untuk menentukan prioritas utama untuk bisa ditangani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis karakteristik bangunan rumah tidak layak huni dinilai berdasarkan kriteria diantaranya; luas bangunan, jenis lantai, Dinding, jenis atap, Mck, Listrik dan air bersih. Rumah Tidak Layak Hunu di Kota Padang Panjang tingkat keparahan paling banyak terdapat pada kriteria jenis atap berada di 12 kelurahan. Sedangkan tingkat prioritas rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan pertama yaitu pada Kelurahan Pasar Usang dan Pasar Baru.
2. Analisis tingkat prioritas berdasarkan status kepemilikan bangunan yang dinilai dari Warga negara indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah, dan belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu satunya dengan kondisi tidak layak huni. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan prioritas dan status kepemilikan. Berdasarkan hasil analisis ini yang menjadi prioritas pertama yaitu Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Pasar Baru dengan jumlah unit masing-masing Kelurahan yang berjumlah 23 unit dan 37 unit. Pada prioritas 2 terdapat di 11 Kelurahan sebanyak 254 unit, 5 Kelurahan pada kecamatan Padang Panjang Barat dan 6 kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Timur. Kemudian pada prioritas 3 terdapat pada kelurahan Silaiang Atas, Guguk Malintang, dan Tanah Pak Lambiak dengan jumlah 45 unit bangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat Prioritas berdasarkan Status Kepemilikan Bangunan

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RTLH	Status Kepemilikan Bangunan		hasil perhitungan penentuan prioritas	
			Milik Pribadi	Bukan Milik Pribadi	hasil skoring	klasifikasi
Kecamatan Padang Panjang Barat	Balai-Balai	12	12	0	8	prioritas 2
	Bukit Surungan	7	6	1	4	prioritas 2
	Kampung Manggis	4	4	0	4	prioritas 2
	Pasar Usang	24	23	1	12	prioritas 1
	Pasar Baru	39	37	2	12	prioritas 1
	Silaing Bawah	20	18	2	7	prioritas 2
	Silaing Atas	5	0	5	1	prioritas 3
Kecamatan Padang Panjang Timur	Tanah Hitam	3	2	1	2	prioritas 2
	Ekor Lubuk	14	12	2	4	prioritas 2
	Ganting	92	87	5	7	prioritas 2
	Guguk Melintang	10	10	0	0	prioritas 3
	Koto Panjang	74	47	27	7	prioritas 2
	Koto Katik	29	21	8	5	prioritas 2
	Ngalau	34	26	8	6	prioritas 2
	Sigando	31	19	12	4	prioritas 2
Tanah Pak lambik	44	35	9	2	prioritas 3	

Sumber: Hasil Analisis 2022

KESIMPULAN DAN SARAN

Prioritas Rumah tidak layak huni pada 16 kelurahan tersebut telah sesuai dengan kriteria pada Peraturan Menteri No.13 Tahun 2016 tentang bantuan stimulant rumah swadaya yang mana tinjauan tersebut digunakan untuk mengetahui prioritas utama yang harus dilakukan penanganan hal tersebut telah di lakukan penelitian untuk mengetahui prioritas tersebut. untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

Prioritas I sebagai penanganan utama yang perlu di tangani sebab memiliki masalah terkait jenis lantai, jenis dinding, jenis atap, mck, dan sumber air yang kondisinya tidak baik. Maka dari itu terdapat di 3 kelurahan yaitu kelurahan pasar usang, pasar baru, dan kelurahan balai balai

Jika prioritas satu sudah ditangani maka di lanjutkan dengan penanganan pada prioritas II yang memiliki masalah terkait luas bangunan, jenis dinding, dan mck yang kondisinya tidak baik. Prioritas II berada di kelurahan bukit surungan, Kelurahan kampung manggis, Kelurahan silaing bawah, Kelurahan tanah hitam. Kelurahan ekor lubuk , Kelurahan ganting , Kelurahan koto Panjang ,Kelurahan koto katik, Kelurahan ngalau,dan Kelurahan sigando

Jika prioritas III sudah ditangani maka di lanjutkan dengan penanganan pada prioritas III yang memiliki masalah terkait luas bangunan, dan jenis dinding yang kondisinya tidak baik.. Prioritas III berada di kelurahan Kelurahan silaing atas Kelurahan guguk malintang Kelurahan tanah pak lambiak.

Saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut, dilakukan Peningkatan kualitas rumah dari tidak layak huni ke layak huni dibutuhkan ketepatan data dalam

menentukan penanganan yang sesuai pada prioritas penanganannya. Dilakukan pemberian insentif untuk memperbaiki rumah tidak layak huni di kota padang Panjang. Prioritas dijadikan acuan dalam program bantuan kepada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada dosen pembimbing, Bapak Ezra Aditya S.T M.Sc yang telah memberikan arahan dan bimbingan dari awal hingga akhir proses penelitian. Selain itu tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada dinas Perumahan dan Permukiman Kota Padang Panjang yang telah membantu dalam pengumpulan data penelitian ini. Selanjutnya untuk pihak-pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang membantu penulis selama proses penelitian. Semoga kebaikan yang telah dtelah iberikan di balas oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang – Undang No 1 Tahun 2011 Tentang rumah dan pemukimn Kawasan , Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- [2] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rumah tidak layak huni
- [3] Vitriana, 2018. “Aspek Prioritas Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Pada Kawasan Metropolitan Bandung Raya. DKI Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
- [4] Sihombing, Erene Gernaria. 2017. “Klasifikasi Data Mining Pada Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Kontrakkan/Sewa Menggunakan K-Mean Clustering Method. Jakarta Selatan. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri (STMIK Nusa Mandiri)
- [5] Muta’ali, Lutfi, 2015. *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGe).
- [6] Diklat Penyelenggara Rumah Swadaya. 2016. “Buku Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni”. Kota Bandung. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan dan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan.